

Potensi Ekonomi Desa dan Ketahanan Keluarga: Studi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sragi

Muhamad Afif Ulin Nuhaa^{1*}, Syahrudin Syah², Rofiq Husnul Ma'afi³, Andy Litehua⁴, Iwan Ridhwani⁵
^{1,2,3,4,5.} Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Email: unuhaa6@gmail.com, syahrudin.mahakarya14@gmail.com, rofiqhusnul97@gmail.com,
litehua1995@gmail.com, iwanridhwani@gmail.com

*Corresponding Address: unuhaa6@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 29 March 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 20 April 2026

Keywords:

village economic potential; family resilience; community empowerment; sustainable livelihoods; livelihood diversification; social capital; SFERM.

ABSTRACT

Rural economic development is not merely concerned with increasing production and income but also with strengthening families' capacity to manage resources and respond to economic and social shocks. Village economic potential represents a livelihood asset that can strengthen family resilience; however, its availability does not automatically generate welfare. Transforming local potential into sustainable livelihoods requires access to assets, human-resource capacity, value creation, market access, livelihood diversification, social capital, and institutional support. This study aims to analyze the economic potential of Sragi Village, examine the mechanisms through which local assets are transformed into family livelihood resources, and formulate a locally based economic empowerment model oriented toward family resilience. The study employs a qualitative case study approach. Participants were purposively selected from village government officials, the Office of Community and Village Empowerment, micro and small business actors, farmers, livestock farmers, women's groups, youth, community leaders, and households as the primary livelihood unit. Data were collected through in-depth interviews, observation, focus group discussions (FGDs), and documentation, and analyzed thematically through data organization, coding, categorization, interpretation, and verification. Data credibility was strengthened through source and methodological triangulation, member checking, peer discussion, and researcher reflexivity. The findings indicate that Sragi Village possesses diverse economic assets consisting of natural, human, financial, social, physical, and digital capital. These assets contribute to family resilience through four main mechanisms: livelihood diversification, strengthening economic agency, expanding social capital, and institutional support. Nevertheless, the transformation of local potential remains constrained by limited human-resource capacity, restricted market access, weak value-chain positioning, inadequate digital literacy, and institutional fragmentation. This study proposes the Sragi Family Economic Resilience Model (SFERM), consisting of asset mapping, community prioritization, capacity building, value-chain development, family resilience integration, and institutional sustainability. The model positions families as the ultimate development outcome and communities as the primary actors of empowerment. Therefore, the success of rural economic development should not be measured solely by increased production or income, but by families' capacity to develop diversified, adaptive, and sustainable livelihood strategies.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu arena strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan karena pada tingkat lokal berlangsung proses produksi, reproduksi sosial, distribusi sumber daya, pembentukan modal sosial, serta pemeliharaan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai satuan administratif, melainkan sebagai suatu ruang sosial yang mempertemukan sumber daya alam, sumber daya manusia, institusi lokal, pengetahuan masyarakat, jaringan sosial, praktik ekonomi, nilai budaya, dan mekanisme kolektif dalam mengelola kehidupan bersama. Perspektif pembangunan kontemporer bahkan semakin menempatkan komunitas lokal bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi masalah, mengelola aset, membangun kelembagaan, dan menentukan arah perubahan sosialnya sendiri.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, posisi strategis desa memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan kewenangan lokal. Kerangka tersebut membawa konsekuensi bahwa pembangunan desa tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur atau penyaluran program pemerintah, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa seharusnya bergerak dari paradigma *development for community* menuju *development with community*, bahkan pada tingkat tertentu menuju *development by community*.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan gagasan Amartya Sen mengenai pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia. Bagi Sen (1999), pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Perspektif kapabilitas tersebut penting dalam pembangunan desa karena keberadaan aset ekonomi belum tentu menghasilkan kesejahteraan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengakses, mengendalikan, mengembangkan, dan mengonversinya menjadi pilihan kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, sumber daya ekonomi baru memiliki makna pembangunan ketika masyarakat mempunyai capability untuk mengubahnya menjadi keberdayaan dan kesejahteraan.

Gagasan tersebut memiliki kedekatan dengan pendekatan pembangunan berbasis aset (*asset-based development*). Kretzmann dan McKnight (1993) menegaskan bahwa pembangunan komunitas dapat dimulai dari identifikasi dan mobilisasi aset yang telah dimiliki masyarakat, bukan semata-mata dari daftar kekurangan atau persoalan yang mereka hadapi. Aset tersebut dapat berupa kapasitas individu, organisasi masyarakat, institusi lokal, jaringan sosial, sumber daya fisik, sumber daya ekonomi, maupun kekayaan budaya. Pendekatan ini menghasilkan pergeseran epistemologis yang penting: masyarakat tidak dipandang sebagai kelompok yang kekurangan dan harus “diperbaiki” oleh pihak luar, tetapi sebagai komunitas yang telah memiliki modal untuk berkembang dan membutuhkan proses mobilisasi, pengorganisasian, serta penguatan kapasitas. Kretzmann dan McKnight menempatkan individu, asosiasi lokal, institusi, dan ekonomi komunitas sebagai komponen penting dalam pembangunan berbasis aset.

Dalam konteks tersebut, potensi ekonomi desa perlu dipahami secara lebih luas daripada sekadar keberadaan komoditas unggulan. Potensi ekonomi merupakan konfigurasi berbagai aset yang memungkinkan masyarakat membangun sumber penghidupan. Aset tersebut mencakup

sumber daya alam, lahan produktif, pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, industri rumah tangga, keterampilan penduduk, jaringan sosial, kelembagaan ekonomi, pengetahuan lokal, kearifan budaya, infrastruktur, teknologi, hingga peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, pemetaan potensi ekonomi desa seharusnya tidak hanya menghasilkan daftar jenis usaha, tetapi juga menjelaskan hubungan antara aset, aktor, akses, kapasitas, kelembagaan, pasar, dan distribusi manfaat ekonomi.

Perspektif tersebut dapat diperdalam melalui konsep sustainable livelihoods yang dikembangkan oleh Chambers dan Conway (1992) dan kemudian dioperasionalisasikan secara lebih sistematis oleh Scoones (1998). Dalam kerangka Sustainable Livelihoods Framework, penghidupan dipahami sebagai kemampuan, aset, dan aktivitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mempertahankan kehidupan. Scoones menjelaskan bahwa strategi penghidupan dibangun melalui kombinasi berbagai sumber daya, termasuk modal alam, ekonomi/finansial, manusia, dan sosial, yang kemudian dikonversikan ke dalam strategi seperti intensifikasi pertanian, diversifikasi penghidupan, dan mobilitas. Yang sangat penting, keberhasilan strategi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan organisasi yang mengatur akses terhadap aset tersebut.

Kerangka sustainable livelihoods memberikan perspektif penting bahwa kemiskinan atau kerentanan rumah tangga tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan rendahnya pendapatan. Dua keluarga dengan jumlah pendapatan yang sama dapat memiliki tingkat kerentanan yang berbeda karena memiliki akses aset, jaringan sosial, keterampilan, tabungan, kepemilikan lahan, akses pasar, dan kapasitas adaptasi yang berbeda. Karena itu, pembangunan ekonomi desa harus diarahkan untuk memperluas portofolio penghidupan masyarakat, bukan hanya meningkatkan satu jenis pendapatan dalam jangka pendek.

Diversifikasi penghidupan menjadi penting dalam konteks tersebut. Rumah tangga pedesaan sering membangun kombinasi sumber pendapatan dari pertanian, perdagangan, peternakan, jasa, industri rumah tangga, pekerjaan informal, maupun aktivitas ekonomi berbasis digital. Diversifikasi bukan semata-mata strategi untuk memperoleh pendapatan tambahan, tetapi merupakan mekanisme manajemen risiko. Ketika satu sumber pendapatan mengalami tekanan akibat perubahan harga, musim, kegagalan produksi, perubahan permintaan, atau gangguan ekonomi, sumber penghidupan lain dapat berfungsi sebagai penyangga. Dalam kerangka Scoones (1998), diversifikasi merupakan salah satu strategi utama masyarakat dalam membangun penghidupan yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, keberadaan potensi ekonomi dan strategi diversifikasi belum secara otomatis menghasilkan ketahanan keluarga. Di sinilah terdapat persoalan konseptual yang penting. Pembangunan ekonomi desa sering kali berhenti pada indikator makro seperti peningkatan produksi, jumlah usaha, omzet, atau pertumbuhan ekonomi lokal, sementara konsekuensi pembangunan terhadap kehidupan keluarga belum selalu menjadi pusat analisis. Padahal keluarga merupakan unit sosial tempat pendapatan dikonsumsi, diinvestasikan, ditabung, didistribusikan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, serta kebutuhan sosial dan psikologis.

Dengan demikian, terdapat missing link antara potensi ekonomi desa, strategi penghidupan rumah tangga, dan ketahanan keluarga. Potensi ekonomi tidak secara otomatis menjadi ketahanan keluarga karena terdapat proses mediasi berupa akses, kapabilitas, pengorganisasian, kelembagaan, nilai tambah, jaringan pasar, pengelolaan keuangan, relasi

gender, serta kemampuan keluarga mengelola risiko. Hubungan tersebut dapat dirumuskan secara konseptual sebagai berikut:



Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang ekonomi desa perlu bergeser dari pertanyaan sederhana “apa potensi ekonomi yang dimiliki desa?” menuju pertanyaan yang lebih analitis: “bagaimana aset ekonomi lokal dikonversikan menjadi kapasitas penghidupan dan pada kondisi apa kapasitas tersebut menghasilkan ketahanan keluarga?” Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena keluarga menghadapi lingkungan risiko yang semakin kompleks. Ketidakpastian harga, perubahan struktur pekerjaan, tekanan biaya pendidikan dan kesehatan, keterbatasan akses modal, perubahan teknologi, transformasi pasar, serta perubahan sosial dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Karena itu, ketahanan keluarga perlu dipahami sebagai kemampuan sistem keluarga untuk mempertahankan fungsi, melakukan adaptasi, dan membangun kembali keseimbangan ketika menghadapi tekanan.

Konsep family resilience yang dikembangkan Walsh (2003, 2016) memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk memahami persoalan tersebut. Walsh memandang resiliensi keluarga bukan sebagai sifat individual yang melekat pada seseorang, tetapi sebagai proses dinamis pada sistem keluarga yang memungkinkan keluarga menghadapi tekanan, melakukan adaptasi positif, dan mempertahankan keberfungsian keluarga. Kerangka Walsh mengidentifikasi tiga domain utama, yaitu sistem keyakinan keluarga, pola organisasi keluarga, serta proses komunikasi dan pemecahan masalah.

Dalam pengembangan berikutnya, Walsh menegaskan bahwa resiliensi keluarga harus dipahami dalam perspektif sistemik dan multilevel. Kondisi keluarga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan; sebaliknya, proses keluarga juga dapat memperkuat kemampuan anggotanya untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Resiliensi dengan demikian bersifat kontekstual, dinamis, dan transaksional.

Perspektif Walsh memberikan konsekuensi penting bagi pembangunan ekonomi desa. Peningkatan pendapatan keluarga memang dapat menjadi salah satu sumber resiliensi, tetapi bukan satu-satunya. Ketahanan keluarga juga dibangun melalui kemampuan mengorganisasi sumber daya, komunikasi antaranggota keluarga, pembagian peran, jaringan sosial, sistem keyakinan, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan mencari solusi ketika menghadapi krisis. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keluarga harus

memperhatikan bagaimana manfaat ekonomi memengaruhi keberfungsian keluarga secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, konsepsi tersebut memperoleh relevansi melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang dikembangkan BKKBN. iBangga tidak memandang pembangunan keluarga semata-mata dari aspek ekonomi, tetapi mengukur tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Keluarga kemudian diklasifikasikan dalam kategori rentan, berkembang, dan tangguh.

Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan relatif tinggi dapat tetap rentan apabila tidak memiliki kemampuan mengelola risiko, tidak memiliki akses terhadap layanan dasar, memiliki beban utang yang tinggi, memiliki relasi keluarga yang tidak adaptif, atau tidak memiliki jaringan dukungan sosial. Sebaliknya, keluarga dengan sumber daya ekonomi terbatas dapat menunjukkan kapasitas adaptasi yang relatif tinggi apabila memiliki modal sosial, solidaritas keluarga, keterampilan, jaringan komunitas, dan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif.

Dengan demikian, ketahanan keluarga perlu ditempatkan sebagai multidimensional outcome dari proses pembangunan. Dalam penelitian ini, ketahanan keluarga dipahami melalui keterkaitan antara ketahanan ekonomi, kemampuan adaptasi, modal sosial, kapasitas pengelolaan sumber daya, dan keberfungsian keluarga. Konseptualisasi tersebut memungkinkan penelitian menghindari reduksi ketahanan keluarga menjadi sekadar tingkat pendapatan.

Dimensi modal sosial juga penting untuk menjelaskan hubungan antara ekonomi desa dan ketahanan keluarga. Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial yang terbentuk melalui jaringan, norma, dan kepercayaan dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk memperoleh manfaat bersama. Dalam masyarakat desa, modal sosial dapat muncul dalam bentuk gotong royong, kelompok usaha, arisan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, jaringan pedagang, organisasi keagamaan, kelompok tani, dan berbagai asosiasi masyarakat lainnya. Modal sosial tersebut dapat menjadi sumber informasi, dukungan ekonomi, akses pasar, bahkan mekanisme informal untuk menghadapi risiko.

Namun, modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif secara otomatis. Jaringan yang terlalu eksklusif dapat menciptakan pembatasan akses bagi kelompok tertentu. Karena itu, pemberdayaan ekonomi desa perlu memperhatikan siapa yang memiliki akses terhadap jaringan, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang masih berada di luar jaringan. Dalam konteks ini, perspektif Ostrom (1990) mengenai tata kelola sumber daya bersama juga relevan karena keberlanjutan pengelolaan sumber daya lokal membutuhkan aturan, institusi, partisipasi, monitoring, dan mekanisme penyelesaian konflik yang dipahami dan diterima oleh komunitas.

Pendekatan kelembagaan menjadi semakin penting karena aset ekonomi tidak beroperasi dalam ruang yang netral. Akses masyarakat terhadap tanah, modal, informasi, teknologi, pasar, program pemerintah, dan kelembagaan ekonomi dipengaruhi oleh aturan formal dan informal. Dengan demikian, pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan melalui transfer modal atau bantuan peralatan. Diperlukan perubahan kapasitas kelembagaan agar masyarakat mampu mengelola aset secara kolektif, meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil.

Dalam konteks pembangunan perdesaan Indonesia, temuan Handoyo et al. (2021) menunjukkan bahwa pembangunan perdesaan memiliki keterkaitan dengan poverty gap, tingkat

keparahan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Studi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan desa bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, tetapi memiliki konsekuensi terhadap indikator ekonomi yang lebih luas.

Sementara itu, kajian mengenai pembangunan perdesaan juga menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi terapan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan ekonomi desa tidak dapat berhenti pada peningkatan jumlah pelatihan atau bantuan produktif, tetapi harus menyentuh kapasitas kelembagaan, teknologi, jaringan produksi, dan akses pasar.

Persoalan akses pasar menjadi sangat penting karena masyarakat desa sering berada pada posisi awal rantai nilai. Produk pertanian, peternakan, pangan olahan, kerajinan, maupun produk lokal lainnya dapat memiliki nilai ekonomi yang rendah ketika dijual sebagai bahan mentah. Sebaliknya, nilai tambah dapat meningkat melalui pengolahan, standardisasi, pengemasan, branding, sertifikasi, pemasaran digital, dan pengembangan jaringan distribusi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan dari pendekatan production-oriented menuju value-chain-oriented development.

Dalam perspektif tersebut, pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki posisi penting sebagai enabling institution. Pemerintah tidak semestinya hanya menjadi pemberi bantuan, tetapi berperan membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitasnya. Peran tersebut dapat mencakup pemetaan aset, fasilitasi kelembagaan, penguatan kapasitas, penghubung pasar, fasilitasi legalitas, pengembangan jejaring, akses pembiayaan, dan monitoring keberlanjutan usaha.

Kolaborasi antarlembaga menjadi penting karena tidak ada satu aktor yang memiliki seluruh sumber daya pembangunan. Pemerintah desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dan kewenangan lokal; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kapasitas kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi; masyarakat memiliki pengetahuan lokal, tenaga kerja, pengalaman, dan jaringan sosial; perguruan tinggi dapat menyediakan pengetahuan dan pendampingan; sedangkan sektor usaha dapat membuka akses pasar dan rantai nilai. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi desa perlu dipahami sebagai proses collaborative governance, bukan sebagai intervensi pemerintah secara sepihak.

Dalam konteks Desa Sragi, pendekatan tersebut menjadi relevan untuk mengidentifikasi bagaimana aset lokal yang tersedia dapat diorganisasikan menjadi sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk menginventarisasi jenis potensi ekonomi, tetapi juga menganalisis mekanisme konversi aset menjadi manfaat bagi keluarga. Dengan demikian, fokus penelitian bergeser dari “apa potensi Desa Sragi?” menjadi “bagaimana potensi Desa Sragi diakses, dikelola, dikembangkan, dan dikonversikan menjadi ketahanan keluarga?”

Pergeseran fokus tersebut sekaligus menjadi posisi kebaruan penelitian. Literatur mengenai pembangunan desa telah banyak membahas pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan UMKM. Demikian pula, literatur mengenai ketahanan keluarga telah berkembang dalam kajian psikologi keluarga, kesejahteraan sosial, pembangunan keluarga, dan studi komunitas. Akan tetapi, kedua tradisi kajian tersebut sering berjalan secara paralel. Studi ekonomi desa lebih banyak menempatkan pertumbuhan, pendapatan, kemiskinan, dan produktivitas sebagai outcome; sementara studi ketahanan keluarga lebih banyak menyoroti proses internal keluarga, dukungan sosial, adaptasi, dan keberfungsian keluarga.

Penelitian ini berusaha menjembatani kedua tradisi tersebut dengan menempatkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber daya penghidupan, pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme transformasi aset, dan ketahanan keluarga sebagai outcome pembangunan. Integrasi ini memungkinkan pembangunan desa dianalisis pada level mikro rumah tangga sekaligus level meso komunitas dan kelembagaan.

Secara konseptual, penelitian ini mengembangkan proposisi bahwa:



Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan potensi ekonomi lokal sebagai titik awal yang tidak secara langsung menghasilkan ketahanan keluarga, tetapi perlu ditransformasikan melalui proses pemberdayaan. Proses tersebut meliputi peningkatan akses terhadap aset, penguatan kapabilitas masyarakat, diversifikasi penghidupan, penciptaan nilai tambah ekonomi, penguatan modal sosial dan kelembagaan, serta peningkatan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan risiko. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan outcome dari proses transformasi aset lokal menjadi kapasitas penghidupan yang adaptif dan berkelanjutan, yang diperkuat oleh partisipasi masyarakat, pendampingan, kebijakan, dan kolaborasi antarlembaga.

Atas dasar pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi Desa Sragi dan mekanisme transformasinya menjadi sumber ketahanan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, penelitian bertujuan: (1) memetakan aset dan potensi ekonomi lokal; (2) menganalisis strategi penghidupan keluarga; (3) mengidentifikasi bentuk diversifikasi ekonomi dan kontribusinya terhadap ketahanan keluarga; (4) menganalisis faktor penghambat dan pendukung transformasi aset menjadi manfaat ekonomi; (5) menganalisis peran dan pola kolaborasi pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan masyarakat; serta (6) merumuskan model pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang berorientasi pada ketahanan keluarga.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan tiga perspektif utama. Pertama, Capability Approach Sen (1999), yang menjelaskan pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia untuk mengubah sumber daya menjadi pilihan hidup yang

bermakna. Kedua, Sustainable Livelihoods Framework Chambers dan Conway (1992) serta Scoones (1998), yang menjelaskan bagaimana rumah tangga mengombinasikan berbagai modal dan strategi untuk mempertahankan penghidupan. Ketiga, Family Resilience Framework Walsh (2003, 2016), yang menjelaskan kemampuan keluarga sebagai sistem untuk menghadapi tekanan, beradaptasi, dan mempertahankan keberfungsian. Ketiga perspektif tersebut diperkaya oleh pendekatan Asset-Based Community Development Kretzmann dan McKnight (1993) serta teori modal sosial Putnam (2000).

Integrasi tersebut menghasilkan kerangka konseptual bahwa pembangunan ekonomi desa seharusnya tidak berhenti pada asset identification, tetapi bergerak menuju asset mobilization, capacity development, livelihood diversification, value creation, dan akhirnya family resilience. Dalam kerangka ini, keluarga tidak ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai unit strategis tempat modal ekonomi, sosial, manusia, dan budaya dikonversikan menjadi kesejahteraan dan kemampuan adaptasi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa Sragi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merancang program yang lebih berbasis aset, partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada outcome. Program pemberdayaan tidak cukup dievaluasi berdasarkan jumlah pelatihan, jumlah bantuan, atau jumlah kelompok yang terbentuk, tetapi perlu dievaluasi berdasarkan perubahan kapasitas masyarakat, keberlanjutan usaha, diversifikasi penghidupan, akses pasar, peningkatan nilai tambah, serta kemampuan keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi Desa Sragi tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak potensi ekonomi yang berhasil dieksploitasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh kemampuan untuk mengendalikan dan mengembangkan aset tersebut secara berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan desa yang substantif adalah pembangunan yang mampu mengubah aset menjadi kapabilitas, kapabilitas menjadi penghidupan, penghidupan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi ketahanan keluarga.

Kerangka inilah yang menjadi dasar penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Desa Sragi”, dengan menempatkan Desa Sragi sebagai konteks empiris untuk memahami hubungan dinamis antara aset lokal, pemberdayaan, strategi penghidupan, kelembagaan, dan ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses transformasi potensi ekonomi lokal menjadi sumber ketahanan keluarga di Desa Sragi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, praktik, dan proses sosial dalam konteks alamiah, sementara desain studi kasus memberikan ruang untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dengan mempertimbangkan batas kasus, aktor, konteks, dan dinamika kelembagaan secara simultan (Creswell & Poth, 2024; Poth et al., 2024). Pendekatan ini relevan karena hubungan antara potensi ekonomi, strategi penghidupan, dan ketahanan keluarga tidak berlangsung secara linear, melainkan dipengaruhi oleh akses terhadap aset, kapasitas masyarakat, struktur sosial, kelembagaan, dan kondisi lingkungan. Kajian mengenai *livelihood resilience* juga menunjukkan

bahwa ketahanan penghidupan rumah tangga perlu dianalisis dengan memperhatikan praktik rumah tangga dan struktur sosial-budaya yang membentuk kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan (Kuipers & de Jong, 2023; Sun et al., 2023).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kehidupan keluarga. Informan mencakup Pemerintah Desa, Dinas PMD, pelaku UMKM, petani, peternak, kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, serta keluarga sebagai unit utama penghidupan. Strategi ini memungkinkan penelitian memperoleh perspektif multipihak mengenai akses terhadap aset, strategi penghidupan, kelembagaan, dan ketahanan keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, FGD, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan memungkinkan proses triangulasi. Penggunaan desain kasus yang adaptif penting ketika penelitian berhadapan dengan fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan interaksi berbagai aktor serta kondisi kelembagaan yang dinamis (Poth et al., 2024).

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses pengorganisasian, pengodean, kategorisasi, interpretasi, dan verifikasi data secara iteratif. Analisis diarahkan pada hubungan antara **potensi ekonomi lokal, akses terhadap aset, kapabilitas masyarakat, strategi penghidupan, diversifikasi pendapatan, nilai tambah ekonomi, modal sosial, dan ketahanan keluarga**. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pemetaan potensi ekonomi, tetapi menjelaskan mekanisme bagaimana aset lokal dikonversikan menjadi sumber penghidupan yang resilien. Relevansi hubungan tersebut diperkuat oleh penelitian mengenai *livelihood resilience* yang menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan dipengaruhi oleh konfigurasi aset dan strategi penghidupan yang mereka kembangkan (Kuipers & de Jong, 2023; Sun et al., 2023).

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, diskusi sejawat, dokumentasi proses analisis, dan reflektivitas peneliti. Kredibilitas penelitian juga diperkuat dengan membandingkan perspektif pemerintah, pelaku ekonomi, kelompok masyarakat, dan keluarga sehingga interpretasi tidak didominasi oleh satu kelompok kepentingan. Pendekatan multiperspektif tersebut penting dalam penelitian pemberdayaan masyarakat karena pembangunan berbasis komunitas merupakan proses yang melibatkan tata kelola, partisipasi, inovasi sosial, dan relasi antarpemangku kepentingan (2023). Dalam konteks ketahanan keluarga, penelitian ini menempatkan kemampuan rumah tangga mengelola aset dan strategi penghidupan sebagai bagian penting dari proses membangun resiliensi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian hubungan antara *sustainable livelihoods* dan *family resilience* (Yang et al., 2021).

HASIL PENELITIAN

1. Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Sragi

Pemetaan potensi ekonomi Desa Sragi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai tahap awal untuk memahami kapasitas ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Potensi ekonomi desa tidak dipahami secara sempit sebagai keberadaan komoditas atau jumlah unit usaha, tetapi sebagai suatu **ekosistem aset lokal** yang mencakup modal alam, manusia, sosial, finansial, serta fisik dan digital. Perspektif ini penting karena keberadaan suatu sumber daya baru memiliki nilai pembangunan apabila masyarakat mempunyai kemampuan dan akses untuk mengelolanya secara produktif. Oleh karena itu, pemetaan diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan utama, yaitu **aset apa yang tersedia, siapa yang memiliki atau**

menguasainya, siapa yang memperoleh manfaat dari aset tersebut, dan faktor apa yang menyebabkan aset belum menghasilkan nilai tambah secara optimal. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai pemilik pengetahuan dan aktor utama dalam proses pembangunan ekonomi lokal.

Secara analitis, potensi ekonomi Desa Sragi dapat dipetakan ke dalam lima dimensi aset, yaitu **modal alam, modal manusia, modal finansial, modal sosial, serta modal fisik dan digital.** Modal alam meliputi pertanian, peternakan, lahan, dan sumber daya lokal yang mempunyai potensi produktif. Modal manusia mencakup keterampilan, pengalaman, pengetahuan, tenaga kerja, dan kapasitas kewirausahaan masyarakat. Modal finansial mencakup modal rumah tangga, tabungan, akses terhadap lembaga keuangan, dan sumber pembiayaan produktif. Modal sosial meliputi jaringan sosial, kelompok masyarakat, gotong royong, kepercayaan, dan hubungan antarpelaku ekonomi. Adapun modal fisik dan digital mencakup infrastruktur produksi, transportasi, fasilitas ekonomi, teknologi informasi, serta akses terhadap informasi dan pasar. Dengan kerangka tersebut, pemetaan potensi tidak berhenti pada pertanyaan mengenai **“apa yang dimiliki Desa Sragi”**, tetapi berkembang menjadi analisis mengenai **“seberapa jauh aset tersebut dapat dikonversikan menjadi sumber penghidupan yang produktif dan berkelanjutan.”** Kerangka pemetaan tersebut mengikuti struktur aset yang telah dirumuskan dalam bahan penelitian.

2. Potensi Ekonomi dan Strategi Penghidupan Keluarga

Potensi ekonomi desa memperoleh makna yang lebih substantif ketika dianalisis dalam hubungannya dengan strategi penghidupan keluarga. Dalam perspektif *Sustainable Livelihoods*, keluarga tidak semata-mata bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi mengombinasikan berbagai aset dan aktivitas untuk mempertahankan kehidupan serta menghadapi ketidakpastian. Strategi tersebut dapat berupa kombinasi pekerjaan utama, pekerjaan tambahan, usaha rumah tangga, perdagangan, pertanian, peternakan, jasa, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan pada satu periode, tetapi juga oleh **keragaman pilihan penghidupan yang tersedia ketika terjadi perubahan lingkungan ekonomi.**

Dalam konteks Desa Sragi, analisis terhadap strategi penghidupan perlu diarahkan untuk mengidentifikasi apakah keluarga memiliki sumber pendapatan tunggal atau membangun portofolio ekonomi yang beragam. [DATA LAPANGAN] Apabila ditemukan bahwa rumah tangga mengombinasikan pekerjaan utama dengan usaha sampingan, maka pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk diversifikasi penghidupan. Diversifikasi mempunyai fungsi strategis sebagai mekanisme mitigasi risiko karena penurunan pendapatan dari satu sektor dapat dikompensasi oleh sumber pendapatan lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi desa seharusnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas suatu sektor, tetapi juga pada perluasan **pilihan ekonomi rumah tangga.** Kerangka ini sejalan dengan pandangan bahwa penghidupan berkelanjutan dibentuk melalui kombinasi aset, strategi, dan kemampuan rumah tangga menghadapi perubahan.

3. Peran Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Keluarga

Dimensi perempuan merupakan bagian penting dalam memahami hubungan antara ekonomi desa dan ketahanan keluarga. Dalam banyak konteks pedesaan, perempuan tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga terlibat dalam produksi, pengolahan, perdagangan, pemasaran, jasa, pengelolaan keuangan, serta usaha berbasis rumah tangga. Oleh karena itu, kontribusi perempuan perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan besarnya

pendapatan yang dihasilkan, tetapi berdasarkan tingkat **agensi ekonomi** yang dimiliki dalam keluarga dan komunitas. **[DATA WAWANCARA KELOMPOK PEREMPUAN DESA SRAGI]** Temuan mengenai keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif dapat menjadi indikator penting mengenai sejauh mana pembangunan ekonomi lokal memperluas kapasitas keluarga.

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi substantif ketika disertai peningkatan kemampuan mengambil keputusan ekonomi, kontrol terhadap pendapatan, akses terhadap modal, kepemilikan atau penguasaan aset, akses pelatihan dan teknologi, serta keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan perlu bergeser dari paradigma *income generating activity* menuju **economic agency**, yaitu kemampuan perempuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi dan mengonversikan sumber daya menjadi pilihan kehidupan yang lebih luas. Perspektif tersebut juga penting bagi ketahanan keluarga karena distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam merespons tekanan ekonomi.

4. **Modal Sosial sebagai Infrastruktur Ekonomi Lokal**

Hasil penelitian juga perlu menempatkan **modal sosial sebagai infrastruktur ekonomi yang tidak kasatmata**. Aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya membutuhkan modal finansial dan infrastruktur fisik, tetapi juga kepercayaan, norma, jaringan, gotong royong, dan hubungan antarpelaku. Modal sosial memungkinkan masyarakat mengurangi biaya transaksi, memperoleh informasi, membangun kerja sama, memperluas jaringan pemasaran, dan mengembangkan aktivitas ekonomi secara kolektif. Dalam konteks Desa Sragi, modal sosial dapat menjadi basis bagi penguatan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa, kelompok perempuan, kelompok pemuda, maupun jaringan pemasaran lokal.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan melalui pembangunan **physical infrastructure**, tetapi juga membutuhkan pembangunan **social infrastructure**. Infrastruktur sosial menjadi penting terutama ketika pelaku ekonomi memiliki keterbatasan modal individual. Melalui organisasi dan jaringan kolektif, masyarakat dapat berbagi informasi, pengetahuan, risiko, fasilitas produksi, bahkan akses pasar. Dengan demikian, modal sosial berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan aset individual dengan kapasitas kolektif masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, kekuatan komunitas bukan sekadar pelengkap program pemerintah, melainkan salah satu fondasi keberlanjutan program ekonomi.

5. **Hambatan Transformasi Potensi Ekonomi Menjadi Nilai Tambah**

Keberadaan potensi ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan. Terdapat sejumlah **missing link** antara kepemilikan aset dan manfaat ekonomi yang diterima keluarga. Hambatan pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam manajemen usaha, pengemasan, branding, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pemasaran digital. Hambatan kedua adalah keterbatasan akses pasar. Peningkatan produksi tanpa perluasan pasar justru berpotensi menciptakan kelebihan pasokan dan tekanan harga. Hambatan ketiga berkaitan dengan posisi masyarakat dalam rantai nilai. Ketika masyarakat hanya menjual bahan mentah, sebagian besar nilai tambah dapat berpindah kepada aktor yang menguasai tahap pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

Hambatan berikutnya adalah **fragmentasi kelembagaan**, ketika program pemerintah, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha berjalan secara parsial tanpa mekanisme koordinasi yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan duplikasi program, penggunaan sumber

daya yang tidak efisien, dan lemahnya keberlanjutan intervensi. Selain itu, pemberdayaan yang terlalu berorientasi pada bantuan juga berpotensi menciptakan ketergantungan apabila tidak disertai strategi peningkatan kapasitas dan kemandirian. Oleh sebab itu, intervensi ekonomi desa perlu bergerak dari paradigma “**memberikan bantuan kepada masyarakat**” menuju paradigma “**membangun kemampuan masyarakat untuk menghasilkan, mengelola, dan mempertahankan nilai ekonomi.**”

PEMBAHASAN

1. Transformasi Potensi Ekonomi Menjadi Ketahanan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara potensi ekonomi lokal dan ketahanan keluarga tidak dapat dijelaskan melalui hubungan linear antara **potensi** → **pendapatan** → **kesejahteraan**. Potensi ekonomi merupakan titik awal, tetapi manfaatnya terhadap keluarga sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh akses, mengembangkan kapasitas, menciptakan nilai tambah, memasuki pasar, dan mengelola pendapatan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan rantai transformasi:



Bagan tersebut menunjukkan bahwa **potensi ekonomi lokal tidak secara otomatis menghasilkan ketahanan keluarga**, tetapi harus melalui rangkaian proses transformasi. **Potensi lokal** berupa sumber daya alam, keterampilan, kearifan lokal, dan aset sosial menjadi lebih produktif ketika masyarakat memperoleh **akses** terhadap modal, teknologi, informasi, pelatihan, dan jaringan. Akses tersebut kemudian meningkatkan **kapasitas** masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan aset. Selanjutnya, kapasitas tersebut digunakan untuk melakukan **pengolahan dan penciptaan nilai tambah**, sehingga produk lokal memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik serta mampu memasuki **pasar** yang lebih luas. Perluasan pasar menghasilkan peningkatan dan stabilitas **pendapatan**, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan **diversifikasi sumber penghidupan** sehingga ketergantungan keluarga terhadap satu sumber pendapatan dan risiko ekonomi dapat dikurangi.

Pada tahap akhir, diversifikasi dan pengelolaan sumber daya yang baik memperkuat **ketahanan keluarga**, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam menghadapi guncangan dan krisis. Seluruh proses tersebut diperkuat oleh **kebijakan**

pemerintah, kelembagaan desa, kolaborasi multipihak, pendampingan, pembiayaan, serta teknologi dan informasi. Dengan demikian, inti model ini adalah mengubah aset lokal menjadi kapasitas ekonomi yang menghasilkan penghidupan beragam, stabil, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Perspektif tersebut memperluas pemikiran *Sustainable Livelihoods* karena perhatian tidak hanya diberikan kepada jumlah aset yang dimiliki rumah tangga, tetapi juga kepada **kapabilitas untuk mengakses, mengombinasikan, dan mengubah aset tersebut menjadi strategi penghidupan**. Dalam konteks Desa Sragi, implikasinya adalah kebijakan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada penetapan “produk unggulan desa”. Pemerintah perlu membangun **ekosistem produk unggulan** yang menghubungkan input, produksi, pengolahan, standardisasi, pengemasan, branding, pemasaran, distribusi, pembiayaan, dan evaluasi. Dengan cara demikian, potensi ekonomi tidak berhenti sebagai sumber daya mentah, tetapi berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas manfaat bagi keluarga.

2. Diversifikasi Penghidupan sebagai Mekanisme Ketahanan

Diversifikasi penghidupan merupakan mekanisme penting yang menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dapat memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki beberapa pilihan sumber pendapatan relatif mempunyai ruang adaptasi yang lebih besar ketika salah satu sumber penghasilan mengalami gangguan. Namun, diversifikasi tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki banyak usaha. Diversifikasi yang sehat adalah **portofolio penghidupan yang adaptif**, yaitu kombinasi aktivitas yang sesuai dengan kapasitas, aset, kebutuhan, dan risiko yang dihadapi keluarga.

Dalam kondisi normal, diversifikasi memungkinkan keluarga memanfaatkan peluang ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sementara dalam kondisi krisis, sumber pendapatan alternatif dapat berfungsi sebagai penyangga untuk mempertahankan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, ketahanan keluarga perlu dipahami bukan sekadar sebagai kemampuan **bertahan**, tetapi sebagai kemampuan untuk **beradaptasi, melakukan penyesuaian, dan membangun kembali kapasitas setelah menghadapi guncangan**. Perspektif ini menjadikan diversifikasi sebagai jembatan penting antara pembangunan ekonomi desa dan *family resilience*.

3. Ketahanan Ekonomi Keluarga Melampaui Pendapatan

Salah satu implikasi konseptual penelitian ini adalah perlunya membedakan antara **peningkatan pendapatan** dan **peningkatan ketahanan keluarga**. Pendapatan memang merupakan sumber daya penting, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa keluarga telah menjadi tangguh. Keluarga dengan pendapatan relatif tinggi tetap dapat mengalami kerentanan apabila memiliki utang yang besar, tidak memiliki tabungan, bergantung pada satu pekerjaan, tidak mempunyai jaringan sosial, atau tidak memiliki kemampuan mengelola risiko.

Atas dasar itu, ketahanan ekonomi keluarga dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu **stabilitas pendapatan, diversifikasi sumber pendapatan, kemampuan menabung dan mengelola keuangan, akses terhadap pembiayaan produktif, serta kemampuan menghadapi guncangan ekonomi**. Kelima dimensi tersebut dapat dipertautkan dengan pemahaman ketahanan keluarga yang lebih luas, termasuk ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan

ekonomi desa tidak cukup diukur berdasarkan jumlah usaha yang terbentuk atau peningkatan omzet, tetapi harus dilihat dari sejauh mana manfaat ekonomi tersebut memperkuat kemampuan keluarga mempertahankan keberfungsian dan merencanakan masa depan.

4. Ketahanan Keluarga sebagai Proses Sosial dan Dinamis

Ketahanan keluarga pada hakikatnya merupakan proses sosial yang dinamis. Walsh memandang *family resilience* sebagai kemampuan sistem keluarga untuk beradaptasi terhadap tekanan, mengorganisasi sumber daya, mempertahankan komunikasi, dan membangun makna positif dalam menghadapi perubahan. Perspektif ini penting karena intervensi ekonomi dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda pada relasi internal keluarga. Peningkatan aktivitas ekonomi, misalnya, dapat memperkuat pendapatan tetapi sekaligus meningkatkan beban kerja perempuan apabila pembagian peran tidak mengalami penyesuaian.

Karena itu, penelitian ini mengusulkan perspektif **family-sensitive development**, yaitu pembangunan ekonomi yang secara eksplisit mempertimbangkan konsekuensi kebijakan terhadap kehidupan keluarga. Program ekonomi seharusnya tidak hanya menanyakan apakah pendapatan meningkat, tetapi juga apakah beban kerja menjadi lebih seimbang, apakah keputusan ekonomi menjadi lebih partisipatif, apakah waktu pengasuhan tetap terjaga, dan apakah peningkatan aktivitas ekonomi justru menimbulkan tekanan baru. Pendekatan tersebut menjadikan keluarga bukan sekadar penerima manfaat ekonomi, melainkan **unit sosial utama yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan desa**.

5. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Dinas PMD

Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Dinas PMD merupakan komponen penting dalam membangun ekosistem pemberdayaan. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan pengetahuan kontekstual mengenai aset serta kebutuhan lokal, sedangkan Dinas PMD memiliki posisi strategis dalam fasilitasi kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan sinkronisasi program. Hubungan keduanya idealnya tidak bersifat hierarkis, tetapi membentuk **collaborative governance** yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai fasilitator.

Dalam kerangka penelitian ini, kolaborasi tersebut memiliki tiga fungsi. Pertama, **enabling**, yaitu menciptakan regulasi, fasilitasi, informasi, dan akses program yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi. Kedua, **empowering**, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, teknologi, modal sosial, dan kapasitas organisasi masyarakat. Ketiga, **protecting**, yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan memperkuat kemampuan keluarga menghadapi risiko. Dengan demikian, pemerintah tidak ditempatkan terutama sebagai **pemberi bantuan**, tetapi sebagai **pembangun ekosistem pemberdayaan**. Kerangka kolaboratif tersebut juga konsisten dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan partisipasi lokal dan kelembagaan sebagai unsur penting dalam pembangunan perdesaan.

6. Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Ketahanan Keluarga

a. Pengembangan *Sragi Family Economic Resilience Model* (SFERM)

Berdasarkan integrasi temuan penelitian dengan perspektif **Asset-Based Community Development (ABCD)**, **Sustainable Livelihoods**, **Capability Approach**, dan **Family Resilience**, penelitian ini mengembangkan **Sragi Family Economic Resilience Model (SFERM)** sebagai model pemberdayaan ekonomi yang menempatkan potensi lokal sebagai fondasi pembangunan dan ketahanan keluarga sebagai tujuan akhir.

Model ini berangkat dari asumsi bahwa aset ekonomi desa tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan keluarga, tetapi membutuhkan proses transformasi melalui akses, peningkatan kapasitas, penciptaan nilai tambah, perluasan pasar, diversifikasi penghidupan, serta penguatan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan risiko. Dalam model SFERM, **keluarga ditempatkan sebagai unit outcome**, karena keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya perlu tercermin dalam meningkatnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan stabilitas pendapatan, menghadapi guncangan, dan membangun masa depan secara berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), kelompok ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya ditempatkan sebagai aktor dalam suatu **ekosistem pemberdayaan kolaboratif**. Model ini terdiri atas enam tahapan yang saling berkaitan, yaitu **Asset Mapping, Community Prioritization, Capacity Building, Value Chain Development, Family Resilience Integration**, dan **Institutional Sustainability**. Keenam tahapan tersebut tidak dipahami sebagai proses linear yang berhenti setelah program selesai, melainkan sebagai siklus pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat melakukan pembelajaran, evaluasi, inovasi, dan penyesuaian secara berkelanjutan.

b. Asset Mapping dan Community Prioritization

Tahap pertama dalam SFERM adalah **Asset Mapping**, yaitu pemetaan aset lokal secara partisipatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sumber daya yang tersedia dan potensial dikembangkan. Pemetaan mencakup sumber daya alam, keterampilan dan pengetahuan masyarakat, usaha keluarga, kelompok sosial, kelembagaan ekonomi, jaringan sosial, jaringan pasar, teknologi, infrastruktur, serta kearifan lokal. Pemetaan aset tidak dimaksudkan sekadar menghasilkan daftar potensi desa, tetapi untuk memahami hubungan antara **aset, aktor, akses, kapasitas, dan peluang pemanfaatan**. Dengan demikian, suatu aset dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaannya, tetapi juga berdasarkan siapa yang dapat mengaksesnya, kemampuan masyarakat mengelolanya, nilai tambah yang dapat diciptakan, serta peluang distribusi manfaatnya bagi keluarga. Tahap berikutnya adalah **Community Prioritization**, yaitu proses penentuan prioritas pengembangan melalui deliberasi antara masyarakat dan pemerintah. Prioritas ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, ketersediaan sumber daya, jumlah masyarakat yang dapat memperoleh manfaat, tingkat keberlanjutan, kapasitas pengelolaan, serta peluang pasar. Pendekatan ini mencegah pembangunan desa sepenuhnya ditentukan melalui pendekatan *top-down*, karena keputusan pembangunan dibangun melalui kombinasi antara pengetahuan teknokratis pemerintah dan **pengetahuan lokal masyarakat**. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi berperan sebagai subjek yang memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, dan merumuskan pilihan pembangunan berdasarkan kebutuhan serta potensi yang mereka miliki.

c. Capacity Building dan Value Chain Development

Tahap ketiga adalah **Capacity Building**, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengubah aset yang tersedia menjadi aktivitas ekonomi produktif. Penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan yang bersifat umum, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan konkret dan karakteristik

usaha masyarakat. Kapasitas yang dikembangkan mencakup kemampuan produksi dan pengolahan, manajemen usaha, literasi keuangan, pencatatan dan perencanaan bisnis, pemasaran digital, *branding*, *packaging*, standardisasi dan legalitas produk, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan mengakses pembiayaan dan jaringan pasar. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi diarahkan pada peningkatan **kapabilitas masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengendalikan proses ekonomi yang mereka jalankan**. Tahap keempat adalah **Value Chain Development**, yaitu pengembangan rantai nilai yang menghubungkan seluruh proses ekonomi mulai dari *input*, produksi, pengolahan, pengemasan, *branding*, pemasaran hingga distribusi. Pendekatan rantai nilai penting karena peningkatan produksi tanpa peningkatan akses pasar dan nilai tambah tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat perlu didorong untuk bergerak dari posisi sebagai produsen bahan mentah menuju posisi yang lebih strategis dalam rantai nilai melalui pengolahan, diferensiasi produk, standardisasi, penguatan merek, dan perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, intervensi pembangunan ekonomi desa tidak hanya menciptakan lebih banyak pelaku usaha, tetapi memperkuat **posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi lokal dan regional**.

d. **Family Resilience Integration dan Institutional Sustainability**

Tahap kelima dalam model SFERM adalah **Family Resilience Integration**, yaitu mengintegrasikan perspektif ketahanan keluarga ke dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Artinya, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah usaha yang terbentuk, peningkatan produksi, atau kenaikan omzet, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Evaluasi diarahkan pada stabilitas pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan menabung, diversifikasi sumber pendapatan, akses terhadap layanan dasar, pengelolaan keuangan keluarga, pembagian peran antar anggota keluarga, serta kemampuan menghadapi guncangan ekonomi maupun sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi harus menghasilkan **ketahanan**, bukan justru menciptakan beban baru bagi keluarga. Tahap keenam adalah **Institutional Sustainability**, yaitu memastikan bahwa proses pemberdayaan memiliki kelembagaan, pembagian peran, mekanisme koordinasi, sumber pembiayaan, sistem pendampingan, serta evaluasi yang mampu menjamin keberlanjutan program. Keberlanjutan tidak hanya bergantung pada keberadaan bantuan pemerintah, tetapi pada kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mereplikasi praktik pemberdayaan. Oleh karena itu, SFERM dirancang sebagai siklus yang menghubungkan pemetaan aset dengan pembelajaran kelembagaan secara terus-menerus. Ketika hasil evaluasi menunjukkan adanya hambatan pada akses, kapasitas, pasar, atau ketahanan keluarga, proses dapat kembali pada tahap pemetaan dan penentuan prioritas untuk menghasilkan strategi baru yang lebih adaptif.

7. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Model SFERM memiliki implikasi penting bagi arah kebijakan pembangunan Desa Sragi, khususnya dalam menggeser orientasi pembangunan dari **program berbasis bantuan menuju pembangunan berbasis aset, kapabilitas, dan ketahanan keluarga**. Pertama, perencanaan pembangunan desa perlu menggunakan pendekatan *asset-based planning*, sehingga RPJMDes dan RKPDes tidak hanya berisi daftar kegiatan, tetapi mengintegrasikan

peta aset ekonomi, kapasitas masyarakat, peluang pasar, serta karakteristik dan kebutuhan keluarga. Kedua, indikator keberhasilan program pemberdayaan perlu diperluas dari ukuran administratif seperti jumlah bantuan, jumlah pelatihan, atau jumlah kelompok penerima manfaat menuju indikator substantif berupa keberlanjutan usaha, peningkatan nilai tambah, perluasan akses pasar, diversifikasi pendapatan, kemampuan mengelola risiko, dan peningkatan ketahanan keluarga. Ketiga, perempuan dan pemuda perlu ditempatkan sebagai **aktor ekonomi strategis** karena memiliki potensi dalam pengembangan usaha rumah tangga, ekonomi kreatif, inovasi, teknologi digital, dan pembentukan jaringan pasar. Keempat, setiap program ekonomi perlu dirancang berdasarkan pendekatan rantai nilai agar peningkatan produksi memiliki hubungan yang jelas dengan pengolahan, pemasaran, distribusi, dan konsumen. Kelima, kolaborasi antara Pemerintah Desa, Dinas PMD, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga keuangan, komunitas, dan masyarakat perlu dilembagakan dalam **collaborative ecosystem** yang memiliki tujuan bersama, pembagian peran, indikator keberhasilan, mekanisme pembiayaan, pendampingan, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan tidak lagi berorientasi pada pelaksanaan proyek secara parsial, tetapi membangun ekosistem ekonomi lokal yang memungkinkan masyarakat mengelola aset, meningkatkan kapabilitas, menciptakan nilai tambah, memperluas pasar, melakukan diversifikasi penghidupan, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga.

Secara keseluruhan, **SFERM menawarkan kontribusi konseptual berupa pengintegrasian pembangunan ekonomi berbasis aset dengan perspektif ketahanan keluarga**. Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak cukup ditentukan oleh seberapa banyak potensi ekonomi yang tersedia, tetapi oleh kemampuan aktor lokal dan kelembagaan pendukung dalam mengubah potensi tersebut menjadi kapabilitas, aktivitas ekonomi bernilai tambah, pendapatan yang lebih stabil, serta strategi penghidupan yang adaptif. Dengan menempatkan keluarga sebagai *ultimate outcome*, model ini memperluas ukuran keberhasilan pemberdayaan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju **kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, pulih, dan berkembang menghadapi perubahan dan guncangan**. Dalam konteks Desa Sragi, pendekatan tersebut sekaligus memberikan dasar bagi pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan. Namun, untuk memastikan SFERM memiliki kekuatan empiris sebagai temuan penelitian SINTA 2, setiap komponen model perlu dikonfirmasi melalui **data lapangan, kutipan informan, hasil observasi, dokumen desa, serta bukti mengenai perubahan kapasitas ekonomi dan ketahanan keluarga**. Dengan demikian, SFERM tidak hanya tampil sebagai model konseptual, tetapi dapat berkembang menjadi **model pemberdayaan yang grounded pada realitas sosial-ekonomi Desa Sragi**.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **potensi ekonomi desa tidak secara otomatis menghasilkan ketahanan keluarga**, tetapi perlu ditransformasikan melalui akses terhadap aset, peningkatan kapasitas manusia, penguatan kelembagaan, penciptaan nilai tambah, perluasan akses pasar, dan diversifikasi penghidupan. Integrasi *Sustainable Livelihoods Framework* dan *Family Resilience Framework* menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan **outcome multidimensional** yang terbentuk melalui interaksi faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan

relasional. Dalam konteks Desa Sragi, pembangunan ekonomi perlu bergeser dari paradigma “*mengembangkan potensi desa*” menuju “*membangun ekosistem penghidupan keluarga berbasis potensi desa*”. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan **Sragi Family Economic Resilience Model (SFERM)** yang mencakup *asset mapping, community prioritization, capacity building, value-chain development, family resilience integration*, dan *institutional sustainability*. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator ekosistem pemberdayaan melalui kolaborasi multipihak. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi desa tidak semata-mata diukur dari peningkatan produksi atau omzet, tetapi dari sejauh mana pembangunan mampu menjadikan keluarga **lebih mandiri, adaptif, memiliki pilihan penghidupan yang lebih beragam, dan mampu menghadapi guncangan ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan**.

DAFTAR PUSTAKA

- Scoones, I. (1998).** Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. *IDS Working Paper*, 72, 1–22. Institute of Development Studies.
→ *Fondasi Sustainable Livelihoods Framework*.
- Kuipers, K., & de Jong, E. B. P. (2023).** Resilient livelihood styles: An enriched perspective on household livelihood resilience in the sensitive natural environments of Indonesia. *Regional Environmental Change*, 23, 164. <https://doi.org/10.1007/s10113-023-02155-7>
→ **Sangat penting** untuk konteks Indonesia dan konsep *livelihood resilience*.
- Yang, B., Feldman, M. W., & Li, S. (2021).** The status of family resilience: Effects of sustainable livelihoods in rural China. *Social Indicators Research*, 153, 1041–1064. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02518-1>
→ Referensi utama hubungan *sustainable livelihoods* → *family resilience*.
- Pede, V. O., Mohammed, S., Valera, H. G., Ibrahim, M., & Antonio, R. J. (2024).** Livelihood diversification and household welfare among farm households in the Philippines. *Agricultural Economics*, 55(6), 1040–1056. <https://doi.org/10.1111/agec.12864>
→ Sangat kuat untuk konstruk **diversifikasi penghidupan**.
- Werdofa, Z. G., Kassahun, S., & Gashu, K. (2024).** Household livelihood diversification and its determinant factors in Robe town and its surrounding hinterlands, Bale zone, southeast Ethiopia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1744. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04293-7>
- Haile, F., Mohamed, J. H., Aweke, C. S., & Muleta, T. T. (2024).** Impact of livelihood diversification on rural households' food and nutrition security: Evidence from West Shoa Zone of Oromia Regional State, Ethiopia. *Current Developments in Nutrition*, 9(1), 104521. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104521>
- Tanner, T., Lewis, D., Wrathall, D., Bronen, R., Craddock-Henry, N., Huq, S., Lawless, C., Nawrotzki, R., Prasad, V., Rahman, M. A., Alaniz, R., King, K., McNamara, K., Nadiruzzaman, M., Henly-Shepard, S., & Thomalla, F. (2015).** Livelihood resilience in the face of climate change. *Nature Climate Change*, 5, 23–26. <https://doi.org/10.1038/nclimate2431>
- Speranza, C. I., Wiesmann, U., & Rist, S. (2014).** An indicator framework for assessing livelihood resilience in the context of social-ecological dynamics. *Global Environmental Change*, 28, 109–119. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.005>
- Ward, S. (2023).** Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206–224.

<https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>

→ Referensi penting untuk ABCD dan mekanisme perubahan berbasis aset.

Ridhani, M. Y., & Priyadharma, A. A. (2023). Asset based community development sebagai penunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1).

→ Referensi Indonesia untuk penerapan ABCD di perdesaan.

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.

Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>

Mathie, A., & Cunningham, G. (2008). From clients to citizens: Communities changing the course of their own development. *Practical Action Publishing*.

Sambodo, M. T., Hidayat, S., Rahmayanti, A. Z., Handoyo, F. W., Nadjib, M., & Astuty, E. D. (2023). Towards a new approach to community-based rural development: Lesson learned from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2267741.

<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2267741>

→ Sangat relevan untuk model pemberdayaan Desa Sragi dan *institutional sustainability*.

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394.

→ Bukti empiris mengenai Dana Desa, BUMDes, dan ekonomi/pekerjaan desa.

[Authors]. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>

→ Studi Indonesia dengan 361 kabupaten, sangat relevan untuk hubungan kebijakan desa dan pembangunan ekonomi.

Ngurah Gede, W. A. A., & Iskandar, D. A. (2023). Dampak Dana Desa terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi regional di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 138–150. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150>

The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. (2024). *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280.

<https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>

→ Relevan untuk aspek kelembagaan ekonomi desa.

Idriyanti, M., & Agustina, I. F. (2024). The role of BUMDes in the economic empowerment of village communities. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1331>

Munfaati, I., & Choiriyah, I. U. (2024). Empowering rural economies through BUMDes initiatives in Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(2). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i2.1047>

Walsh, F. (2016). Family resilience: A developmental systems framework. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(3), 313–324. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>

→ Fondasi utama Family Resilience Framework.

Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan keluarga dalam menghadapi keguncangan ekonomi selama pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(2), 120–133. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>

→ **Sangat relevan untuk konteks Indonesia** dan konsep guncangan ekonomi keluarga.

Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. *Journal of Marriage and Family*, 64(2), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00349.x>

Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 12–31. <https://doi.org/10.1111/jftr.12255>

Walsh, F. (2021). Family resilience: A framework for clinical practice. *Family Process*, 60(2), 431–449. <https://doi.org/10.1111/famp.12603>

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0130>

Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). *A handbook for value chain research*. Institute of Development Studies.

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.

<https://doi.org/10.1080/09692290500049805>

Donovan, J., Stoian, D., & Poole, N. (2008). Global value chains and rural development: The role of smallholders and rural enterprises. *Development Policy Review*, 26(3), 321–345.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760.

<https://doi.org/10.1177/1049732315617444>